

Pendekatan Struktural Dalam Manajemen Konflik (Studi Literatur)

Mila Hulkiah¹, Winarti Syaharuddin², Rahmat Zulfikar³, Siradjuddin⁴

^{1,2,3,4} Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: milahulkiah@gmail.com¹, winartisyaharuddin2@gmail.com²,
rachmad.zulfikar24@gmail.com³, siradjuddin@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Studi ini mengkaji konflik melalui pendekatan struktural dengan mengeksplorasi teori konflik, sistem sosial, analisis jaringan, dan resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada tinjauan pustaka terhadap teori-teori relevan dan studi-studi terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh ketimpangan struktural, perbedaan kepentingan, kelemahan institusi politik dan sosial, serta interaksi antaraktor dalam jaringan sosial. Konflik terjadi pada tingkat mikro, meso, dan makro, di mana hubungan antara individu, kelompok, dan institusi memengaruhi perkembangannya. Meskipun konflik dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik juga dapat memperkuat solidaritas sosial, mendorong reformasi kelembagaan, dan memajukan perubahan sosial yang positif. Pendekatan struktural terhadap resolusi konflik menekankan pada penanganan akar penyebab konflik melalui keadilan sosial, penguatan kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan konflik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, konflik tidak hanya harus dipahami sebagai masalah sosial, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki sistem sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Konflik, Pendekatan Struktural, Sistem Sosial, Analisis Jaringan, Resolusi Konflik*

Abstract

This study examines conflict from a structural approach by exploring conflict theory, social systems, network analysis, and conflict resolution. The research employs a qualitative method based on a literature review of relevant theories and previous studies. The findings indicate that conflict is driven by structural inequalities, differences in interests, weak political and social institutions, and interactions among actors within social networks. Conflict occurs at the micro, meso, and macro levels, where relationships between individuals, groups, and institutions influence its development. Although conflict may create social tension, it can also strengthen social solidarity, encourage institutional reform, and promote positive social change. A structural approach to conflict resolution emphasizes addressing the root causes of conflict through social justice, institutional strengthening, and

sustainable mechanisms for conflict management. Therefore, conflict should not only be understood as a social problem but also as an opportunity to improve the social system and achieve a more equitable, stable, and sustainable society.

Keywords: *Conflict, Structural Approach, Social System, Network Analysis, Conflict Resolution*

Pendahuluan

Konflik adalah fenomena yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia, baik itu pada tingkat individu, kelompok, organisasi, maupun negara. Dalam konteks sosial yang semakin rumit, konflik timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai-nilai, serta ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Maka dari itu, kita sebaiknya tidak hanya melihat konflik sebagai masalah hubungan antarindividu, melainkan juga sebagai fenomena yang terkait dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi.

Evolusi dalam studi ilmu sosial menunjukkan bahwa konflik tidak selalu memiliki konotasi buruk. Menurut Lewis A. Coser (1956), konflik bisa memperkuat solidaritas dalam kelompok dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Namun, potensi konflik untuk menjadi merusak juga ada, terutama jika disebabkan oleh ketidakadilan yang terstruktur dan tidak dikelola dengan baik.

Salah satu pendekatan yang sering dipakai untuk menganalisis konflik adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini mengungkapkan bahwa konflik terjadi bukan hanya karena faktor individu, tetapi juga disebabkan oleh ketidakmerataan dalam pembagian kekuasaan, akses ke sumber daya, serta kelemahan pada institusi sosial dan politik. Johan Galtung (1969) dengan konsep structural violence-nya menjelaskan bahwa ketidakadilan yang ada dalam sistem sosial dapat menjadi pemicu utama terjadinya konflik, meskipun tak selalu disertai dengan kekerasan yang jelas.

Di samping dipengaruhi oleh struktur, konflik juga melibatkan sejumlah aktor yang saling berinteraksi dalam suatu jaringan sosial. Charles Tilly (2003) menunjukkan bahwa konflik erat kaitannya dengan hubungan kekuasaan yang terbentuk melalui interaksi antara pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda. Di sisi lain, faktor sistemik seperti ketidakstabilan politik, ketimpangan ekonomi, dan pengaruh dari luar juga mampu memperkuat dinamika konflik. Samuel P.

Huntington (1968) menyatakan bahwa konflik cenderung muncul ketika perubahan sosial terjadi lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas institusi politik untuk mengelolanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, konflik adalah suatu fenomena yang rumit dan memiliki banyak dimensi, sehingga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk mengetahui sumber-sumber penyebab dan cara penyelesaiannya. Pendekatan yang bersifat struktural memberikan kerangka untuk analisis yang tidak sekadar menitikberatkan pada penyelesaian konflik sementara, tetapi juga pada perbaikan struktur yang menjadi pemicu konflik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konflik melalui cara struktural dengan mempertimbangkan teori konflik, sistem sosial, penyebab-penyebab struktural, analisis jaringan para aktor, serta pendekatan untuk menyelesaikan konflik. Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan manajemen konflik dalam masyarakat yang kian kompleks dan dinamis.

Landasan Teori

1. Teori Kekerasan Struktural (Structural Violence) Johan Galtung

Teori Kekerasan Struktural yang diperkenalkan oleh Johan Galtung pada tahun 1969 mengemukakan bahwa pertikaian tidak muncul semata-mata dari tindakan kekerasan langsung, tetapi juga dapat dipicu oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi yang tidak adil. Galtung berpendapat bahwa kekerasan struktural terjadi ketika sistem tertentu menghalangi individu atau kelompok dalam mendapatkan hak, kesempatan, dan kesejahteraan secara adil. Ketidakadilan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemiskinan, diskriminasi,

ketimpangan sosial, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya yang terus berlangsung tanpa menunjukkan kekerasan fisik yang jelas. Dengan demikian, kelompok yang terkena dampak ketidakadilan cenderung merasa terasing, berpotensi mengarah pada konflik sosial.

Galtung mengklasifikasikan kekerasan ke dalam tiga kategori, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Ketiga jenis kekerasan ini saling terkait dalam proses pembentukan dan pemeliharaan konflik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak hanya dapat dilakukan dengan menghentikan kekerasan yang terjadi secara langsung, tetapi juga perlu menghapuskan struktur yang memunculkan ketidakadilan tersebut. Dalam kajian ini, teori Galtung berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis bahwa konflik merupakan hasil dari ketimpangan dalam struktur sosial, sehingga solusi yang tepat harus tertuju pada perbaikan sistem dan institusi yang berkontribusi terhadap konflik tersebut.

2. Teori Konflik Lewis A. Coser

Lewis A. Coser (1956) melihat konflik sebagai elemen alami dalam interaksi sosial dan tidak selalu membawa konsekuensi buruk. Menurut pandangannya, jika dikelola dengan cermat, konflik dapat memiliki efek positif, seperti memperkuat solidaritas dalam kelompok, menggarisbawahi batas sosial antar kelompok, dan berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan dalam sistem yang dianggap tidak adil. Selain itu, konflik juga bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan, sehingga menghindari penumpukan ketegangan yang lebih signifikan dalam komunitas.

Dalam pandangan Coser, konflik berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat beradaptasi dengan perubahan sosial. Saat terjadi ketidakadilan atau ketimpangan dalam suatu sistem, konflik dapat memicu pergeseran kebijakan atau transformasi struktur sosial. Namun, jika konflik berlarut-larut tanpa solusi yang memadai, hal ini berpotensi berkembang menjadi konflik yang merusak dan mengancam hubungan sosial yang ada. Untuk itu, teori Coser menawarkan perspektif bahwa konflik tidak hanya harus dilihat sebagai isu,

tetapi juga sebagai kesempatan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Teori ini diterapkan dalam penelitian untuk menjelaskan peranan konflik dalam proses transformasi sosial yang menjadi komponen dari pendekatan struktural.

3. Teori Kebutuhan Manusia John Burton

Teori Kebutuhan Manusia yang diperkenalkan oleh John Burton pada tahun 1990 menguraikan bahwa konflik timbul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan fundamental manusia. Burton mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat universal, seperti rasa aman, identitas, pengakuan, kebebasan, partisipasi, dan kesejahteraan. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat diabaikan atau dinegosiasikan; jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi oleh masyarakat atau negara, baik individu maupun kelompok akan berusaha untuk memperjuangkannya dengan berbagai cara, termasuk melalui konflik.

Burton berpendapat bahwa menyelesaikan konflik tidak hanya cukup dengan berdiskusi mengenai kepentingan, tetapi harus dapat memenuhi kebutuhan dasar dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian konflik perlu difokuskan pada perubahan kebijakan, penguatan lembaga, serta penciptaan sistem sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil. Dalam kajian ini, teori Burton digunakan untuk menggambarkan bahwa pendekatan struktural dalam pengelolaan konflik harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian penting dari upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Metode ini diambil karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis

dan mengevaluasi gagasan konflik dengan menggunakan pendekatan struktural yang didasarkan pada berbagai teori, temuan penelitian, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Penelitian ini tidak mencakup pengumpulan data di lapangan, melainkan lebih kepada kajian kritis terhadap literatur yang berhubungan dengan teori-teori konflik, struktur sosial, analisis jaringan, serta cara penyelesaian konflik.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal akademik, prosiding, serta referensi akademis lainnya yang membahas konflik dengan sudut pandang sosiologi, ilmu politik, dan studi tentang perdamaian. Literatur dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian agar dapat memberikan dasar teori yang menyeluruh.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pemilihan, dan analisis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, yaitu teori konflik, penyebab struktural dari konflik, sistem sosial, analisis aktor dalam jaringan, dan pendekatan untuk resolusi konflik.

Analisis data diterapkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi. Beragam konsep, teori, dan temuan penelitian dianalisis, diinterpretasikan, dan disintesis untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika konflik dari sudut pandang struktural. Hasil dari analisis tersebut kemudian dipaparkan secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara struktur sosial, aktor, dan mekanisme penyelesaian konflik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan dari penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pendekatan Struktural Dalam Manajemen Konflik

Pendekatan struktural dalam pengelolaan konflik adalah metode yang memandang konflik sebagai masalah yang tidak hanya muncul dari perbedaan antara individu atau kelompok, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini, konflik dianggap sebagai hasil dari ketidaksetaraan dalam interaksi sosial, distribusi

kekuasaan, akses terhadap sumber daya, serta kelemahan sistem yang mengatur kehidupan bersama.

Konflik yang timbul dalam sebuah sistem sering kali merupakan akibat dari isu yang lebih dalam. Oleh karena itu, meredakan konflik tidak cukup hanya dengan mengakhiri perdebatan yang ada, tetapi perlu dilaksanakan melalui perbaikan pada struktur yang memicu konflik tersebut. Pendekatan struktural bertujuan untuk mengidentifikasi sumber masalah sehingga konflik dapat dihindari dari kemunculan di masa mendatang.

Seperti yang dijelaskan oleh Galtung (1969), konflik dapat timbul akibat kekerasan struktural, yaitu kondisi di mana suatu sistem sosial menciptakan ketidakadilan yang menyebabkan beberapa kelompok mengalami keterbatasan dalam akses terhadap hak, peluang, dan kesejahteraan. Kekerasan struktural ini berbeda dari kekerasan langsung karena tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan fisik, melainkan terwujud melalui sistem yang tidak adil. Maka dari itu, penyelesaian konflik perlu difokuskan pada perubahan struktur yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut.

Di samping itu, Burton (1990) dalam Human Needs Theory menjelaskan bahwa konflik muncul karena kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Kebutuhan tersebut antara lain mencakup keamanan, identitas, pengakuan, kebebasan, dan partisipasi. Jika struktur sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, individu atau kelompok akan melakukan perlawanan yang dapat berubah menjadi konflik. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan konflik, penting untuk memperhatikan kebutuhan dasar dari pihak yang terlibat.

Azar (1990) juga mengungkapkan bahwa konflik sosial yang berkepanjangan sering muncul akibat adanya ketidakadilan dalam sistem politik, ekonomi, serta sosial yang berlaku. Faktor penyebab konflik tidak hanya berakar

pada perbedaan kepentingan, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya institusi negara, ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, serta ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga. Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik, diperlukan perubahan dalam struktur yang lebih menyeluruh.

Dalam upaya menyelesaikan konflik, Lederach (1997) menekankan esensi dari pendekatan pembangunan perdamaian yang tidak hanya terbatas pada penghentian konflik, tetapi juga melibatkan transformasi terhadap hubungan sosial dan struktur yang ada. Ia berpendapat bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan memerlukan tiga elemen utama, yaitu perbaikan struktur yang tidak adil, penciptaan hubungan yang lebih harmonis antar kelompok, serta penguatan kemampuan masyarakat serta lembaga dalam menangani konflik.

Pendekatan struktural juga berhubungan dengan ide transformasi konflik, yaitu proses yang berupaya mengubah situasi yang memicu konflik menjadi interaksi yang lebih positif. Mac Ginty dan Richmond (2013) mengungkapkan bahwa perdamaian dapat diperoleh tidak hanya melalui penyelesaian konflik secara resmi, tetapi juga meliputi perubahan sosial yang melibatkan masyarakat serta mempertimbangkan kondisi lokal.

Di Indonesia, konflik sering diasosiasikan dengan masalah ketidakadilan sosial, persaingan dalam menguasai sumber daya, perbedaan kepentingan, serta pengelolaan hubungan antar kelompok yang lemah. Oleh karena itu, manajemen konflik dengan pendekatan struktural menjadi krusial karena memandang konflik dengan cara yang komprehensif, termasuk mengidentifikasi penyebab, pelaku, hubungan kekuasaan, dan situasi sosial yang berpengaruh terhadap konflik.

Sehingga, pendekatan struktural dalam manajemen konflik menekankan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan bentrokan antar pihak, tetapi juga masalah sistemik yang harus diperbaiki. Penyelesaian yang efektif dalam konflik harus menyentuh akar permasalahan melalui perubahan struktur, pengurangan ketidakadilan, dan penguatan institusi sosial.

2. Teori Konflik (Perspektif Fungsionalis Dan Teori Lapangan)

Konflik adalah aspek dari interaksi sosial yang muncul akibat perbedaan dalam kepentingan, nilai, tujuan, atau akses terhadap sumber daya. Di dalam studi

ilmu sosial, konflik tidak hanya dianggap negatif, melainkan juga bisa menjadi bagian dari proses perubahan dan adaptasi dalam masyarakat. Walaupun konflik dapat memunculkan ketegangan, jika dikelola dengan baik, ia bisa memicu perubahan sosial yang positif.

Pendekatan struktural memandang konflik sebagai hasil dari interaksi antar individu, kelompok, dan sistem sosial yang dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan, norma, dan kondisi sosial yang ada. Dua teori yang menerangkan konflik dari perspektif ini adalah perspektif fungsionalis dan teori lapangan

a. Perspektif Fungsionalis

Konsep fungsionalis mengenai konflik dikembangkan, antara lain, oleh Lewis A. Coser dalam bukunya *The Functions of Social Conflict* (1956). Berbeda dengan pandangan yang melihat konflik sebagai penyebab kerusakan sosial, Coser beranggapan bahwa konflik juga memiliki peranan tertentu bagi kelangsungan sistem sosial. Menurut Coser, konflik dapat membantu masyarakat atau kelompok dalam memperkuat hubungan di dalam, memperjelas batasan antara kelompok, serta mendorong perubahan ketika kondisi tertentu dianggap tidak tepat.

1. Konflik Memperkuat Solidaritas Kelompok

Konflik dapat meningkatkan solidaritas di dalam kelompok, terutama saat kelompok tersebut menghadapi ancaman atau tekanan dari luar. Ketika terjadi konflik dengan kelompok lain, anggota kelompok cenderung mengurangi perbedaan di dalam dan lebih mengutamakan tujuan bersama. Situasi semacam ini dapat memperkuat identitas kelompok dan meningkatkan rasa kebersamaan. Namun, jika konflik berlangsung terlalu lama dan tidak terkendali, hal ini bisa berpotensi memicu perpecahan internal.

2. Konflik Mendorong Perubahan Sosial

Konflik juga dapat berfungsi sebagai pendorong bagi perubahan sosial.

Biasanya, konflik muncul akibat ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu, seperti ketidakadilan, ketimpangan, atau peraturan yang dianggap tidak berlaku. Melalui konflik, kelompok yang merasa dirugikan dapat mengekspresikan tuntutan dan mendorong perubahan dalam sistem sosial. Dengan kata lain, konflik memiliki peran sebagai mekanisme penyesuaian agar masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan di sekitarnya.

3. Konflik Sebagai Koreksi Terhadap Ketidakadilan

Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan adanya masalah dalam suatu sistem sosial. Ketika ada ketidakseimbangan kekuasaan atau distribusi sumber daya, konflik menjadi cara bagi kelompok tertentu untuk mengungkapkan kepentingannya. Ini sejalan dengan konsep kekerasan struktural yang diungkapkan oleh Johan Galtung (1969), yaitu bahwa ketidakadilan dalam struktur sosial dapat menciptakan situasi yang memicu konflik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik perlu berfokus pada perbaikan struktur yang menjadi penyebabnya, bukan sekadar menghentikan konflik itu sendiri.

b. Teori Lapangan (Field Theory)

Teori lapangan, yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin (1951), menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungannya. Lewin merumuskan konsep: $B=f(P,E)$ yang menggambarkan bahwa perilaku (Behavior) adalah fungsi dari individu (Person) dan lingkungan (Environment).

Dalam kerangka konflik, teori ini menjelaskan bahwa konflik timbul bukan hanya karena karakter individu, melainkan akibat interaksi berbagai kekuatan dalam lingkungan sosial. Masing-masing pihak dalam konflik berada dalam suatu medan sosial yang memiliki kekuatan yang saling mempengaruhi.

1) Kekuatan Pendorong (Driving Forces)

Kekuatan pendorong adalah faktor yang membuat individu atau kelompok melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks konflik, kekuatan pendorong ini bisa berupa kepentingan politik, ekonomi, kebutuhan sosial, atau hasrat untuk mempertahankan sumber daya. Semakin kuat keinginan suatu kelompok untuk

meraih kepentingannya, semakin tinggi kemungkinan timbulnya konflik jika ada pihak lain dengan tujuan yang berbeda.

2) Kekuatan Penghalang (*Restraining Forces*)

Kekuatan penghalang adalah elemen yang mempertahankan stabilitas dan mencegah terjadinya konflik yang terbuka. Elemen ini bisa berupa peraturan hukum, norma masyarakat, nilai-nilai budaya, dan keberadaan institusi yang mengatur interaksi antar pihak. Namun, jika kekuatan penghalang tidak berfungsi dengan baik, konflik yang awalnya tersimpan bisa berkembang menjadi konflik yang lebih nyata.

3) Ketidakseimbangan Kekuatan dalam Sistem

Dalam teori lapangan, konflik terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara kekuatan pendorong dan penghalang. Ketika dorongan kepentingan lebih dominan dibandingkan mekanisme kontrol, kemungkinan konflik meningkat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak hanya harus menyoroti tindakan pihak yang berseteru, tetapi juga harus mempertimbangkan perubahan dalam kondisi lingkungan dan struktur yang mempengaruhi hubungan antar pihak.

3. Susunan Sistem Konflik

Konflik merupakan suatu fenomena sosial yang muncul dari interaksi berbagai elemen dalam masyarakat. Pemicunya tidak hanya perbedaan pendapat antar individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, relasi kekuasaan, kepentingan kelompok, dan kondisi lingkungan yang membentuk interaksi di antara aktor. Maka dari itu, konflik harus dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari beragam komponen yang saling berhubungan.

Pendekatan sistem konflik menunjukkan bahwa setiap konflik memiliki elemen-elemen yang saling berinteraksi, seperti aktor yang terlibat, kepentingan,

hubungan di antara pihak-pihak terkait, dan faktor-faktor yang memicu konflik. Perubahan dalam satu aspek sistem bisa berdampak pada perkembangan konflik secara keseluruhan. Dengan memahami struktur sistem konflik, kita dapat menganalisis proses kemunculan, perkembangan, dan penyelesaian konflik dengan lebih mendalam.

a. Tingkatan Sistem Konflik: Mikro, Meso, dan Makro

Konflik dapat diteliti melalui beberapa tingkatan. Pada level mikro, konflik terjadi di antara individu atau kelompok kecil. Konflik di tingkat ini biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, komunikasi yang tidak efektif, prasangka, atau persaingan antara pihak-pihak tersebut.

Di level meso, konflik muncul di antara kelompok, organisasi, lembaga, atau komunitas. Konflik pada tingkatan ini sering berhubungan dengan perebutan sumber daya, pengaruh, atau perbedaan kepentingan di antara kelompok yang bersangkutan. Sementara itu, pada level makro, konflik berhubungan dengan struktur yang lebih luas, seperti kebijakan negara, sistem politik, ekonomi, ataupun hubungan antarkelompok dalam masyarakat. Konflik di tingkat makro sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik di tingkat yang lebih kecil akibat ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam sistem yang ada. Ketiga tingkat ini saling terkait satu sama lain. Konflik pada tingkat individu dapat berkembang menjadi konflik kelompok, di mana konflik struktural pada tingkat negara juga bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

b. Hubungan antara Sistem dan Sub-Sistem

Sistem sosial terdiri dari berbagai sub-sistem seperti ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sosial. Masing-masing bagian memiliki fungsi dan kepentingan yang saling terhubung. Konflik dapat muncul ketika terjadi ketidakseimbangan atau ketidakcocokan antara sub-sistem tersebut. Sebagai contoh, kebijakan ekonomi yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dapat mengakibatkan ketidakpuasan. Selain itu, sistem politik yang tidak memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dapat membuat mereka merasa terasing dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, konflik tidak dapat dianalisis hanya dari satu aspek. Penelitian konflik harus mempertimbangkan hubungan antara

berbagai elemen dalam sistem, termasuk bagaimana kebijakan, aktor, dan kondisi sosial saling mempengaruhi.

Studi mengenai konflik sosial menunjukkan bahwa sering ada kombinasi faktor yang memicu kemunculan konflik, seperti perbedaan kepentingan, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta lemahnya komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat.

c. Ketidakcocokan Struktur Negara dan Identitas Sosial

Struktur konflik juga dapat timbul ketika terdapat ketidakcocokan antara sistem negara dan identitas sosial masyarakat. Identitas sosial seperti etnis, budaya, atau kelompok tertentu dapat menjadi pendorong konflik jika kelompok tersebut merasa tidak mendapatkan pengakuan, perlakuan yang adil, atau kesempatan yang setara. Perbedaan identitas sebenarnya tidak selalu menimbulkan konflik. Namun, konflik bisa muncul ketika perbedaan tersebut diperburuk oleh ketimpangan sosial, ekonomi, atau politik. Kelompok yang merasa tersisih dapat mengalami ketegangan dengan kelompok lain serta dengan negara.

Dalam konteks Indonesia, konflik sosial seringkali berkaitan dengan isu keberagaman, perebutan sumber daya, dan lemahnya integrasi sosial. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan struktur sosial serta hubungan di antara kelompok.

4. Penyebab Struktur Konflik

Konflik dalam masyarakat tidak muncul secara mendadak, tetapi biasanya dipengaruhi oleh kondisi yang telah berkembang dalam suatu sistem sosial, politik, dan ekonomi. Pendekatan struktural menunjukkan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam kekuasaan, ketidakadilan dalam pembagian sumber daya, lemahnya lembaga, serta ketidakmampuan sistem dalam

mengelola perbedaan kepentingan. Menurut Galtung, penyebab konflik tidak hanya berasal dari kekerasan yang bisa terlihat secara kasat mata, tetapi juga dapat bersumber dari kekerasan struktural, yaitu keadaan dalam masyarakat yang membuat sebagian kelompok mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak, peluang, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk memahami penyebab konflik, penting untuk memperhatikan kondisi struktur yang membentuk interaksi antar kelompok.

a. Ketidakstabilan Politik dalam Sistem Pemerintahan

Ketidakstabilan politik merupakan salah satu elemen struktural yang dapat memicu terjadinya konflik. Keadaan ini muncul saat sistem pemerintahan tidak mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kepercayaan kepada masyarakat. Rendahnya legitimasi pemerintah, perselisihan antar elit politik, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya partisipasi masyarakat dapat menimbulkan ketegangan sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa kepentingannya tidak terwakili oleh pemerintah, ketidakpuasan dapat tercipta dan berpotensi mengarah ke konflik. Selain itu, persaingan politik yang tidak sehat dapat memunculkan kelompok-kelompok yang berlawanan, memperdalam jurang perbedaan kepentingan. Huntington menyatakan bahwa stabilitas politik sangat bergantung pada kemampuan lembaga politik dalam mengelola perubahan sosial. Ketika perubahan sosial berlangsung lebih cepat daripada kemampuan lembaga untuk mengelolanya, kemungkinan timbulnya konflik menjadi lebih tinggi.

b. Lemahnya Institusi Negara

Di samping faktor politik, konflik juga dapat terjadi karena kelemahan institusi negara. Lembaga yang tidak kuat membuat pemerintah menjadi tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti penegakan hukum, pelayanan publik, pengelolaan keamanan, dan penyelesaian perbedaan di masyarakat. Apabila lembaga tidak beroperasi dengan baik, masyarakat dapat kehilangan keyakinan terhadap negara. Situasi ini bisa memunculkan aktor lain yang mencoba mengambil alih peran dalam pengaturan kehidupan sosial. Akibatnya, konflik kepentingan akan semakin sulit untuk ditangani karena tidak ada lembaga yang dipercaya untuk mengatur. Rotberg menjelaskan bahwa negara yang lemah

memiliki kemampuan terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga keamanan, dan mempertahankan legitimasi pemerintahan. Hal ini bisa meningkatkan risiko munculnya konflik baik sosial maupun politik.

c. **Pengaruh Lingkungan Eksternal (Faktor di Luar Sistem)**

Konflik juga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh kondisi dari luar sistem sosial. Faktor eksternal seperti perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi informasi, hubungan antarnegara, serta pengaruh aktor internasional dapat memperburuk konflik yang sudah ada. Sebagai contoh, tekanan ekonomi dari luar dapat memperlebar ketimpangan dalam masyarakat, sementara perkembangan teknologi informasi dapat mempercepat penyebaran informasi yang memperkuat perbedaan antar kelompok.

5. Analisis Aktor dalam Konflik (Pendekatan Jaringan / Network Analysis)

Analisis aktor dalam konflik adalah metode yang digunakan untuk mengenali pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik, interaksi antar pihak, serta cara distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam suatu sistem sosial. Konflik terjadi bukan hanya karena adanya perbedaan kepentingan, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi antar aktor yang memiliki tujuan, sumber daya, dan tingkat pengaruh yang bervariasi.

Pendekatan jaringan menganggap konflik sebagai interaksi di antara aktor-aktor. Aktor yang terlibat dalam konflik bisa berupa individu, kelompok masyarakat, pemerintah, lembaga, atau pihak luar yang tertarik dengan situasi tersebut. Melalui analisis jaringan, kita dapat mengidentifikasi aktor yang paling berpengaruh, cara pola hubungan terbentuk, serta bagaimana jaringan ini dapat

memperburuk atau meredakan konflik.

a. Identifikasi Aktor Utama dalam Konflik

Langkah awal dalam analisis jaringan konflik adalah menemukan siapa saja aktor yang terlibat. Aktor tidak hanya terdiri dari mereka yang berkonflik secara langsung, tetapi juga termasuk pihak lain yang memiliki dampak pada situasi konflik, seperti pemerintahan, lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, atau mediator. Setiap aktor membawa kepentingan, tujuan, dan strategi yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemetaan untuk memahami posisi setiap pihak, apakah mereka memperburuk konflik, terdampak oleh konflik, atau berkontribusi pada penyelesaian konfliknya. Dalam konteks konflik sosial, pemetaan aktor dapat mengungkap hubungan antara pihak-pihak yang kuat dan yang lemah. Ini sangat penting agar penyelesaian konflik memperhatikan tidak hanya kelompok yang dominan, tetapi juga kelompok yang kurang berdaya dan terbatas akses terhadap kekuasaan.

b. Pola Hubungan dan Distribusi Kekuasaan Antar Aktor

Setelah mengidentifikasi aktor, langkah selanjutnya adalah menganalisis hubungan yang ada di antara mereka. Dalam pendekatan jaringan, hubungan ini bisa berupa kolaborasi, kompetisi, dukungan, atau pertikaian. Tidak seluruh aktor mempunyai pengaruh yang setara. Beberapa aktor memiliki posisi yang lebih signifikan karena akses terhadap sumber daya, informasi, kekuasaan, atau jaringan yang lebih luas. Mereka yang berada pada posisi strategis dalam jaringan biasanya memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah perkembangan konflik dan proses penyelesaiannya. Menurut Hafner-Burton, Kahler, dan Montgomery (2009), analisis jaringan membantu dalam memahami bagaimana hubungan antar aktor dapat membentuk pola kekuasaan dan memengaruhi perilaku sosial serta politik. Dengan memahami struktur jaringan ini, pihak yang menangani konflik bisa merumuskan strategi penyelesaian yang lebih efektif.

c. Peran Jaringan dalam Eskalasi dan Penyelesaian Konflik

Jaringan antar aktor bisa menjadi elemen yang membuat konflik semakin besar namun juga dapat berfungsi sebagai jalan menyelesaikannya. Konflik dapat meningkat ketika sejumlah aktor berhasil menggalang dukungan dari jaringan

yang lebih luas. Di sisi lain, jaringan juga dapat membantu meredakan konflik melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama. Dalam proses penyelesaian konflik, aktor yang memiliki koneksi luas, seperti pemimpin komunitas, pemerintah, atau mediator, bisa bertindak sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berkonflik. Hubungan tersebut dapat digunakan untuk membangun saling percaya dan menemukan solusi bersama.

6. Penyelesaian Konflik Berdasarkan Struktur

Penyelesaian konflik berbasis struktur adalah metode yang memperhatikan bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang lebih luas seperti ketidakadilan, perbedaan akses terhadap sumber daya, lemahnya lembaga, serta ketidakseimbangan kekuatan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus tidak hanya fokus pada penghentian konflik secara langsung, tetapi juga melakukan perubahan terhadap struktur penyebab konflik agar perdamaian dapat terjaga secara berkelanjutan. Menurut Galtung, konflik dapat timbul akibat adanya kekerasan struktural, yang merupakan kondisi saat sistem sosial, ekonomi, dan politik menyulitkan kelompok tertentu dalam meraih hak dan peluang. Dengan demikian, penyelesaian konflik harus berfokus pada penciptaan keadilan struktural, bukan sekadar menghilangkan kekerasan yang tampak. Perdamaian yang ideal adalah keadaan di mana masyarakat tidak hanya bebas dari konflik terbuka, tetapi juga memiliki sistem yang adil untuk semua pihak.

a. Mewujudkan Keadilan Struktural

Langkah pertama dalam penyelesaian konflik berbasis struktur adalah menangani ketidakadilan yang ada di masyarakat. Konflik sering kali muncul ketika ada kelompok tertentu yang merasa tidak mendapatkan akses yang setara

terhadap sumber daya, hak, dan peluang. Ketidakmerataan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan yang memicu konflik sosial. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik perlu dilakukan dengan merubah kebijakan, memperbaiki distribusi pembangunan, mengakui hak-hak kelompok masyarakat, dan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Dengan terciptanya struktur sosial yang lebih adil, hubungan antara kelompok dapat lebih seimbang sehingga potensi konflik bisa diminimalisir.

Dalam konteks Indonesia, konflik agraria dan konflik sumber daya alam seringkali terkait dengan isu distribusi, penguasaan lahan, dan akses masyarakat terhadap sumber daya. Penyelesaian konflik tidak hanya dapat dilakukan melalui hukum, tetapi juga perlu pendekatan keadilan sosial agar kepentingan masyarakat terakomodasi.

b. Memperkuat Institusi dan Tata Kelola

Penyelesaian konflik berbasis struktur juga menekankan perlunya penguatan institusi. Lembaga seperti pemerintah, sistem hukum, organisasi masyarakat, dan lembaga adat berperan penting dalam mengatur hubungan sosial serta menyediakan cara untuk menyelesaikan konflik. Institusi yang kokoh dapat menetapkan aturan yang jelas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan. Sebaliknya, kelemahan institusi dapat memperburuk konflik karena masyarakat tidak memiliki tempat yang memadai untuk menyampaikan kepentingan mereka. Dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam di Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga lokal seperti pranata adat dapat berperan penting dalam penyelesaian konflik karena memiliki aturan dan mekanisme yang dikenal oleh masyarakat setempat. Penguatan lembaga lokal dapat mendukung terciptanya penyelesaian konflik yang lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

c. Mengembangkan Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Berkelanjutan

Penyelesaian konflik berbasis struktur tidak bertujuan hanya untuk menghentikan konflik secara sementara, tetapi untuk membangun perdamaian yang dapat bertahan dalam waktu lama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme seperti dialog, mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, dan keterlibatan masyarakat dalam

proses penyelesaian konflik.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian yang esensial dalam penyelesaian konflik karena masyarakat adalah pihak yang paling memahami akar persoalan dan kondisi sosial yang terjadi. Menurut pendekatan pembangunan perdamaian, perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan perubahan dalam hubungan sosial, membangun kembali kepercayaan, dan kerja sama antara pihak-pihak yang sebelumnya terlibat konflik. Dalam masyarakat Indonesia, konflik dapat diselesaikan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Berbagai studi mengindikasikan bahwa praktik adat dan budaya setempat bisa menjadi cara untuk membangun komunikasi, mempererat hubungan sosial, serta meredakan ketegangan antara kelompok.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa konflik muncul tidak hanya karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakadilan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan struktural berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik, perlu ditangani akar masalahnya dan tidak hanya diselesaikan yang tampak saja.

Pendekatan struktural menekankan pada pentingnya menciptakan keadilan sosial, memperkuat lembaga, serta memperbaiki cara distribusi sumber daya agar konflik tidak terulang kembali. Selain itu, konflik bisa memberikan efek positif jika dikelola dengan tepat, misalnya mendorong perubahan sosial, meningkatkan solidaritas, dan memperbaiki kualitas hubungan antar kelompok.

Secara keseluruhan, pendekatan struktural dalam pengelolaan konflik menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan

melibatkan komunitas, memperkuat institusi, serta membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik, konflik dapat berubah menjadi kesempatan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

Daftar Pustaka

- Allan, T., & Curtis, A. (2005). *Conflict and Collaboration: Knowledge and the Management of Water*. London: Routledge.
- Ambarwati, A., & Raharjo, S. T. (2018). Pemetaan Aktor dalam Konflik Sosial sebagai Upaya Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Azar, E. E. (1990). *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*. Aldershot: Dartmouth Publishing.
- Burt, R. S. (2004). Structural Holes and Good Ideas. *American Journal of Sociology*, 110(2), 349–399.
- Burton, J. (1990). *Conflict: Resolution and Provention*. London: Macmillan.
- Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa, S. (2020). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Call, C. T., & Cousens, E. M. (2008). Ending Wars and Building Peace: International Responses to War-Torn Societies. *International Studies Perspectives*, 9(1), 1–21.
- Cederman, L. E., Gleditsch, K. S., & Buhaug, H. (2013). *Inequality, Grievances, and Civil War*. Cambridge University Press.
- Collins, R. (1975). *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Cunningham, D. E., Gleditsch, K. S., & Salehyan, I. (2009). It Takes Two: A Dyadic Analysis of Civil War Duration and Outcome. *Journal of Conflict Resolution*, 53(4), 570–597.
- Dewi, I. M. (2015). Konflik dan Disintegrasi di Indonesia. *Mozaik Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil War. *American Political Science Review*, 97(1), 75–90.
- Fisher, S., et al. (2001). *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*. London: Zed Books.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.

- Hafner-Burton, E. M., Kahler, M., & Montgomery, A. H. (2009). Network Analysis for International Relations. *International Organization*, 63(3), 559–592.
- Hastuti, D., & Pamungkas, T. K. (2024). Analisis Resolusi Konflik Agraria di Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Paradigma Madani*.
- Herdiansyah, J. (2014). Manajemen Konflik dalam Sebuah Organisasi. *Jurnal STIE Semarang*, 6(1).
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Irwandi & Chotim. (2017). Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Kamar, M. Z., Casmini, & Sa'adah, N. (2023). Gawé Rapah sebagai Model Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Seribu Masjid, Lombok. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*.
- Lewin, K. (1951). *Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers*. New York: Harper & Row.
- Mac Ginty, R., & Richmond, O. P. (2013). The Local Turn in Peace Building: A Critical Agenda for Peace. *Third World Quarterly*, 34(5), 763–783.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (1999). *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press.
- Mulyadi. (2002). Konflik Sosial Ditinjau dari Segi Struktur dan Fungsi. *Humaniora Universitas Gadjah Mada*.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41–46.
- Rotberg, R. I. (2003). *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. Washington: Brookings Institution Press.
- Sulastriyono. (2014). Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat. *Jurnal Media Hukum*.

- Susan, N. (2009). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Susan, N. (2010). Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Susan, N. (2019). Sosiologi Konflik: Teori dan Analisis Konflik Sosial. Jakarta: Kencana.
- Susetyo, Ikram, & Damayantie. (2021). Pendekatan Sistemik untuk Analisis dan Transformasi Konflik: Studi Kasus Konflik Sosial di Desa Balinuraga. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya.
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.